



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Penerapan Inovasi Aplikasi Simda di BPKD Padang Pariaman

Cindy Fitra Rahmadani¹, Syamsir², Diva Rizalia³, Fani Izwar⁴, Mivta Maharani⁵, Nia Aprilian⁶, S. Amanda Putri⁷, Syakira Mishwa Hanifah⁸.

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, cindyfitra2189@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, syamsirsaili@yahoo.com

³Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, divaarizaliaaputri@gmail.com

⁴Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, faniizwar06@gmail.com

⁵Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, mivtamaharani11@gmail.com

⁶Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, niaafriilian0804@gmail.com

⁷Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, s.amandaputri93@gmail.com

⁸Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, haramishwa@gmail.com

Corresponding Author: cindyfitra2189@gmail.com¹

Abstract: *Analysis of the Application of SIMDA in Preparing Financial Reports at the Regional Financial Management Agency of Padang Pariaman Regency. The Financial Regional Management Implementation System (SIMDA) is an application program used to assist local governments in the field of financial management. The aim of this research is to find out how SIMDA is implemented in the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Padang Pariaman Regency. This research is qualitative research with descriptive methods. The data in this research was collected through interviews, observation and documentation. As well as knowing employees' understanding of implementing SIMDA Finance and the obstacles faced in its implementation. There were two respondents in the study, data was collected through direct interviews with respondents. The results of the interviews and data collected were analyzed descriptively using a phenomenological approach. The research results show that employees generally understand the meaning of financial SIMDA and an overview of its implementation regarding input and output data. Obstacles faced in implementing the SIMDA Finance application: SIMDA expires quickly, the network is often offline, there is no documentation regarding summary flow diagrams showing cash flow data, the data management system is weak, procedures for viewing incidental data still take too long, office space is still limited. inadequate and the occurrence of human error*

Keyword: *Application SIMDA, BPKD, Financial.*

Abstrak: Analisis Penerapan SIMDA Dalam Menyusun Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sistem Implementasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan adalah program aplikasi yang digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam bidang manajemen keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan SIMDA pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta mengetahui pemahaman pegawai dalam penerapan SIMDA Keuangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Responden dalam penelitian berjumlah dua orang, data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif metode menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mempunyai memahami pengertian SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya terkait data masukan dan keluaran. Kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi SIMDA Finance ini SIMDA cepat habis masa berlakunya, jaringan sering offline, tidak ada dokumentasi tentang diagram alur ringkasan yang menunjukkan data arus kas, sistem pengelolaan data yang lemah, prosedur untuk melihat data kebetulan masih terlalu lama, ruang kantor masih kurang memadai serta terjadinya human error.

Kata Kunci: Aplikasi SIMDA, BPKD, Keuangan.

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi semakin maju, pemerintah harus bisa mengembangkan teknologi informasi agar mereka mudah mengakses, mengelola, dan menggunakannya secara tepat, cepat, dan akurat. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban baik kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan menyediakan informasi keuangan untuk pelayanan publik. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Persamaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur keuangan daerah untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal nasional dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan desentralisasi. Dukungan sistem informasi diperlukan

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam kehidupan bisnis dan organisasi nirlaba saat ini. Menurut Kinarwanto (2012), teknologi ini pada hakikatnya perlu menjawab kebutuhan informasi secara tepat waktu (quick), tepat waktu (accurate), dan tepat sasaran (relevant). Kecepatan pemrosesan yang tinggi diperlukan karena informasi tersedia tepat waktu pada saat dibutuhkan. Ketika informasi yang diberikan akurat, kebutuhan yang tepat terpenuhi dan keputusan yang tepat didukung. Manfaat dari penggunaan informasi ini hanya akan terasa jika tersedia bagi orang-orang yang tepat dan benar-benar membutuhkannya. Oleh karena itu, informasi tersebut juga harus relevan bagi pengguna.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi berupa sistem informasi yang terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). SIMDA Keuangan merupakan sistem informasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Pembangunan Keuangan (BPKP) untuk dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melaksanakan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis kinerja.

Agar dapat dianggap efektif, penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) harus memenuhi kriteria tertentu. Menurut Pangestika dan Sari (2016), penelitian dan implementasi SIMDA harus memberikan informasi yang dapat diandalkan, dapat dipahami, relevan, sebanding, dan tepat waktu. Dalam hal ini, efektivitas SIMDA sangat penting bagi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Namun terdapat berbagai kendala dan permasalahan dalam mekanisme penyusunan laporan keuangan.

Penerapan SIMDA pada organisasi sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Sebagaimana disyaratkan oleh standar akuntansi pemerintahan, informasi akuntansi harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevansi, keandalan, komparabilitas, dan pemahaman. Dengan meningkatkan kualitas informasi, laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan sebagai bentuk tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi.\

Dalam pelaksanaan SIMDA, Pemerintah Padang Pariaman mencakup penganggaran, pengelolaan, akuntansi dan pelaporan dalam suatu proses pengelolaan keuangan daerah secara terpadu. Proses penganggaran dapat berupa RKA, Uraian APBD dan perubahannya, serta dokumen DPA, Rancangan APBD. Proses administrasi seperti perintah pembayaran, laporan pendanaan, serta permintaan pembayaran atau SPP, serta register dan berbagai formulir pengendalian anggaran lainnya. Sedangkan untuk kegiatan akuntansi dan pelaporan berupa jurnal, laporan keuangan, buku, ketentuan pertanggungjawaban dan penjelasannya, laporan arus kas. Meski begitu, ukuran efektivitas penggunaan SIMDA Keuangan masih belum banyak diketahui. Oleh karena itu, menarik untuk melakukan analisis terhadap topik ini dan memperoleh data mengenai penerapan pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan.

Masih terdapat laporan dan keluhan dari pengguna mengenai berbagai permasalahan yang ditemui selama penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan tersebut antara lain penyajian data yang tidak lengkap, kesalahan alokasi dan alur laporan keuangan akibat transaksi, pergantian personel keuangan dan kurangnya keterampilan operasional di SIMDA, serta kurangnya program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Semua permasalahan tersebut mempengaruhi kinerja dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga diperlukan upaya yang tepat dan cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada implementasinya, Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman mempunyai beberapa kendala dan beberapa permasalahan strategis. Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Strategi yang sedang disusun sejalan dengan misi utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Pariaman Kekurangan sumber daya manusia (SDM) dibidang manajemen, keuangan daerah, dan pengelolaan aset Kekurangan sumber daya manusia di bidang manajemen tercermin dari banyaknya pegawai yang bekerja di bidang tersebut, kesalahan masih sering terjadi dan masih menyelesaikan pekerjaan dengan lambat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus studi kasus di Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai dampak partisipasi anggaran terhadap kinerja pengelolaan, dengan mempertimbangkan konteks dan situasi spesifik di wilayah tersebut. Populasi penelitiannya adalah para manajer internal perusahaan pada sektor bisnis yang sedang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Sampel dipilih secara purposif, yaitu melibatkan manajer yang mempunyai pengalaman menyusun anggaran dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Instrumen utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan angket atau pedoman wawancara yang dikembangkan khusus untuk penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka, memberikan kesempatan kepada responden untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara detail. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama mengenai partisipasi anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan dampaknya terhadap kinerja manajemen. Dalam pelaksanaannya prinsip etika penelitian sangat dijunjung tinggi, dimana partisipan penelitian diberikan informasi yang cukup dan memberikan persetujuan

sebelum diwawancara. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap etika penelitian serta menjaga kepercayaan dan integritas sepanjang proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SIMDA Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud, Rizan. 2013). Program aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan salah satu pengembangan produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di sektor pemerintahan (Ariska dan Indriasari, 2017). Menurut Djaja (dalam Budiman, dkk. 2013) aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan salah satu aplikasi data base yang memiliki tujuan memudahkan pengelolaan keuangan pada didaerah lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dikembangkan melalui sistem dengan memperhatikan serta mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, pengendalian terhadap aplikasi menjadi salah satu keharusan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keuangan ialah salah satu program aplikasi komputer yang telah terintegrasi untuk membantu proses administrasi pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan maupun kelurahan (Natsir, 2017).

Dalam mengelola data terkait informasi keuangan, pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten (BPKD) Padang Pariaman sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi SIMDA Keuangan karena dapat memberikan kemudahan bagi pegawai dalam mengelola informasi keuangannya. Sekretaris Lurah dan Bendahara Pembantu selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa hanya tinggal menginput data transaksi ke dalam menu-menu aplikasi yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat laporan keuangan.

Pada badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) kabupaten padang pariaman, proses penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan meliputi: Prosedur Anggaran yakni Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), prosedur pada PPK-OPD yakni proses Verifikasi, Perbendaharaan dan Akuntansi. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Output aplikasi ini antara lain:

1. Penganggaran

Tahap awal dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten padang pariaman berupa proses penyusunan program dan kegiatan OPD melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dalam penyusunan anggaran kas selama satu tahun penggunaan anggaran dengan cara masuk melalui user manual dan password yang diminta. Setelah itu, arahkan informasi melalui menu data entry untuk menginput header Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kemudian anggaran untuk hasil perencanaan kegiatan serta laporan yusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pilih Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sedangkan untuk Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Penatausahaan

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan penatausahaan. Dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Padang Pariaman mencakup beberapa rincian prosedur dokumen untuk memulainya. Untuk Prosedurnya manual hampir sama dengan system penganggaran, untuk hasil dapat dilihat pada bagian Laporan Tata Usaha (LTU) yang akan menuntun operator dalam memilih setiap rincian dokumen yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan tampilan lembar kerja Aplikasi SIMDA Keuangan untuk prosedur Penatausahaan. Dimana Penatausahaan keuangan meliputi proses peginputan beberapa dokumen yakni Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D),Surat Tanda Setoran(STS), register serta formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

3. Akuntansi dan Pelaporan

Proses Akuntansi melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pada badan pengelola keuangan daerah (BPKD) kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah sistem pencatatan yang memberikan gambaran seperti jurnal, buku, buku pembantu lainnya. Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca. Semua itu dilakukan melalui prosedur penginputan saldo awal, data transaksi dan penyesuaian. Sedangkan prosedur pelaporan dimaksudkan untuk penyediaan data base keuangan yang sudah tersimpan di aplikasi SIMDA. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Padang Pariaman yang kemudian dijadikan bahan rekonsiliasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah PEMDA Kabupaten padang pariaman.

Secara umum pegawai di BPKD Padang Pariaman telah mengetahui makna SIMDA keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya. Hal tersebut tentunya memperkuat pemahaman mereka dalam memanfaatkan penerapan SIMDA keuangan.

Penerapan SIMDA pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman

Pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman mulai pada tahun 2006 menggunakan aplikasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan yang masih digunakan hingga saat ini terkhususnya SIMDA FMIS yang digunakan untuk penatausahaan dan pelaporan. Penerapan aplikasi ini digunakan sebagai alat pengendali penatausahaan keuangan daerah yang memiliki interoperability dengan aplikasi SIKD Sinergi Kementrian Keuangan sehingga laporan realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman dapat dipantau oleh Kementrian Keuangan.

Penerapan SIMDA sangat berperan penting bagi BPKD, dengan adanya SIMDA pengelolaan data transaksi serta penyampaian laporan keuangan pemerintahan, maka laporan keuangan pemerintahan daerah itu menjadi kian handal serta efisien dalam penyampaiannya. Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat menjamin keamanan data yang diolah melalui pengendalian keamanan secara fisik.

Dalam realisasi APBD terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, pertama di BAPEDA perencanaan apa yang akan dibelanjakan oleh dinas-dinas di Kabupaten Padang Pariaman, Dalam proses ini ada yang namanya RKPDP (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) setelah itu masuk ke tahapan KUARPS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Anggaran Sementara) lalu baru masuk ke tahap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Jadi belanja daerah tersebut dari sekian triliun totalnya terdaftar pada aplikasi SIMDA.

Sarana yang dibutuhkan Dalam pengimplementasian SIMDA ini berupa computer, aplikasi SIMDA Keuangan, dan jaringan internet. Aplikasi SIMDA Keuangan diinstal ke computer sesuai petunjuk yang dikeluarkan oleh BPKD. Setelah diinstal, computer

dihubungkan pada server melalui jaringan internet untuk mendapatkan nama pengguna serta kata kunci untuk masuk ke aplikasi SIMDA Keuangan.

Proses pencairan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang diimplementasikan pada aplikasi SIMDA oleh kantor BPKD Kabupaten Padang Pariaman di setiap bidang ada beberapa bagian operator, misalnya pada bidang penganggaran, diakses oleh operator dalam semua tahapan di keuangan memakai aplikasi SIMDA mulai dari pendapatan, pajak dan akuntansi serta semua bidang pencairan di BPKD menggunakan aplikasi SIMDA. Selama penggunaan aplikasi ini, sangat membantu BPKD Dalam proses pengelolaan keuangan. Perubahan yg terjadi dengan adanya aplikasi SIMDA yaitu pertama, historis selama pemasukan data bisa dilacak sedangkan jika menggunakan cara manual susah melacaknya. Kedua, lebih cepat dan tepatnya pengelolaan, karena jika menggunakan cara manual masih sering terjadi kesalahan dalam menjumlahkan data.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi SIMDA pada BPKD Padang Pariaman

Dalam penerapannya, penggunaan aplikasi SIMDA tidak selalu dapat berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat kendala dalam penerapannya yang menyebabkan aplikasi SIMDA tidak dapat berfungsi dengan baik. Faktor penghambat berikut ini yang menjadi kendala dalam implementasi SIMDA :

1. Software dan Jaringan

Masalah software dan jaringan adalah yang paling banyak dibahas dan dibahas karena hampir semua orang mengeluh tentang masalah ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masalah terbesar pada software dan jaringan SIMDA adalah jaringan server yang tidak stabil, yang mempersulit akses aplikasi. Salah satu faktor yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program adalah masalah perangkat lunak dan jaringan, menurut Nugroho (2008).

2. Sarana dan Prasarana

Implementasi SIMDA membutuhkan perangkat keras yang terdiri dari perangkat jaringan, server database, dan komputer atau laptop. Banyak masalah dengan komponen ini dapat membahayakan data database. Kendala lainnya adalah sulitnya menyampaikan keluhan dan saran mengenai hardware server SIMDA. Apabila terjadi kerusakan, petugas SIMDA dapat mengirimkan permohonan perbaikan. Namun pada kenyataannya hal ini tidak dapat terjadi dengan cepat karena mengharuskan pengembang SIMDA untuk menjadi pusat proses dan bersiap beradaptasi dengan kebutuhan perangkat SIMDA yang rusak. Hal ini sesuai dengan pemahaman dan Hertanto, Domai dan Amin (2016).), yang menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam penerapan SIMDA, dimana segala perbaikan sistem aplikasi hanya dapat dilaksanakan jika pusat selaku pengembang program SIMDA menyikapi perbaikan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan informasi keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi SIMDA Keuangan, karena dapat memudahkan pengelolaan informasi keuangan bagi pegawai. Penyelenggaraan SIMDA mempunyai peranan yang sangat penting bagi BPKD, karena SIMDA mengelola data transaksi dan menyampaikan laporan keuangan negara, sehingga penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah semakin handal dan efisien.

Dalam penerapannya, penggunaan aplikasi SIMDA tidak selalu berjalan sesuai keinginan karena terdapat permasalahan atau kendala dalam penerapannya yang menyebabkan aplikasi SIMDA tidak dapat berfungsi dengan baik. Faktor penghambat yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SIMDA:

1. Software dan Jaringan

Masalah terkait software dan jaringan merupakan masalah yang krusial dan paling banyak dibahas, karena hamper semua mengeluhkan masalah ini. Hasil dari wawancara yang dilakukan terkait tentang kendala ini ditemukan bahwa kendala utama pada software dan jaringan pada SIMDA yaitu jaringan server yang tidak stabil sehingga aplikasi sulit untuk mengakses secara bagus.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam penerapan SIMDA menggunakan hardware yang terdiri dari set komputer atau laptop, perangkat jaringan, dan server database, dan masing-masing dari komponen ini sangat rentan terhadap masalah yang dapat membahayakan data database. Kendala lain yaitu sulitnya memberikan keluhan dan umpan balik mengenai masalah hardware pada server SIMDA.

REFERENSI

- Aida Hayatun Thaiybah, Herlina Pusparini, & Robith Hudaya. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Yang Lebih Berkualitas (Studi Pada Kantor Lurah Gerung Selatan). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.182>
- Ariska, Y. I., & Indriasari, N. (2019). ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu). *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(2), 51–63. <https://doi.org/10.33369/insight.12.2.51-63>
- Darea, D. W., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Emba*, 3(2), 114–122.
- Dewi, P. A. P. L., Animah, A., & Mariadi, Y. (2021b). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 19(1), 72–86. <https://doi.org/10.53512/valid.v19i1.195>
- Pratama, S. Y. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 153. <https://doi.org/10.52239/jar.v4i2.600>
- Rahadi, D. D. R. (2007). Peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. *Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007)*, 2007(November), 1–13.
- Syarifuddin, D. (2020). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Di Pemerintah Kabupaten Sarmi. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 5(2), 174–198. <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i2.1287>
- Yanto, E., & Afkir, M. (2020). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN) DALAM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli). *Indonesian Journal of Strategic Management*, 3(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v3i1.2819>